

Dinamika Kehidupan Pers di Indonesia pada Tahun 1950–1965: Antara Kebebasan dan Tanggung Jawab Nasional

ABSTRACT

In the period of initial sovereignty recognition (1950-1956), Indonesian press experienced higher freedom. Toward government, military and the President Soekarno, press gave positive encouragement when they made political, social and economic decisions, which were beneficial for public, encouraging democratic life, establishing good national reputation and maintaining national unity. But the support of press for government was not without critique and losing its freedom. Of the events assumed to be violating democratic life, press had critiqued sharply and outspokenly. Indonesian press in 1950-1956, therefore, enjoyed its higher freedom in liberal democratic political life. The signs of press freedom had declined starting from 1956. The exchange of parliamentary governmental cabinet, no dominant political force winner in the 1955 General Election, and regional turbulence against central government in 1957 had made government, military and the President Soekarno prevailed the nation in danger (SOB, Staat van Oorlog en Beleg). In the name of SOB, the freedom of press was limited. Moreover, in 1958, press was controlled by the government and military by being required to have a SIC (Surat Izin Cetak or Publishing Permit Letter). When the President Soekarno reached his authority effectively in 1959-1965, the freedom of press had ended in Indonesia because it was only used as legal instrument for government's political policies. But the press had been co-opted by the authority could participate in demolishing the authority. The falling of Soekarno, started with the incident of G-30-S in 1965, was also because of the press, which was initially able to be controlled strictly, but then they back fabled and demolished the authority of President.

Key words: *liberal democratic period, press freedom, guided democratic period, and press control.*



^{*)}Andi Suwirta, M.Hum. adalah Dosen Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) di Bandung. Beliau dilahirkan di Subang, Jawa Barat, pada 9 Oktober 1962. Menamatkan pendidikan Magister Humaniora (M.Hum.) dari Program Studi Ilmu Sejarah Pascasarjana UI (Universitas Indonesia) di Jakarta pada tahun 1996, dengan menulis tesis, dan kemudian diterbitkan, mengenai *Suara dari Dua Kota: Revolusi Indonesia dalam Pandangan Surat kabar Merdeka (Jakarta) dan Kedaulatan Rakjat (Yogyakarta), 1945-1947* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 2000). Untuk kepentingan akademik, beliau boleh dihubungi dengan alamat: Komp. Vijaya Kusuma B-11 No.15-16 Cipadung, Bandung 40614, Jawa Barat, Indonesia. E-mail: atriwusidna@gmail.com

PENDAHULUAN

Periode tahun 1950–1965, dalam sejarah kontemporer Indonesia, sering disebut sebagai zaman Demokrasi Liberal dan zaman Demokrasi Terpimpin. Zaman Demokrasi Liberal (1950-1959) ditandai oleh sistem pemerintahan parlementer, dengan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan, sedangkan Presiden dan Wakil Presiden hanya sebagai kepala negara tanpa kekuasaan yang efektif. Sementara itu zaman Demokrasi Terpimpin ditandai oleh kekuasaan yang besar dan memusat pada Presiden Soekarno – seiring dengan dominannya kekuatan politik golongan komunis dan tentara – sampai dengan sistem kekuasaan itu ambruk karena pertentangan tajam dan konflik internal yang keras pada tahun 1965.

Corak pemerintahan yang berbeda pada periode 1950-1965 itu juga membawa implikasi bagi kehidupan dan perkembangan pers di Indonesia. Pers memang merupakan pantulan dan saksi aktual pada zamannya. Ia tidak hanya memberitakan berbagai peristiwa yang dinilai penting pada zamannya, tetapi juga turut memberikan pandangan dan sikap terhadap fenomena yang disaksikannya tersebut. Dan yang dimaksud dengan “pers” dalam hal ini tidak hanya surat kabar, radio dan kantor berita, tetapi juga televisi yang pada awal tahun 1960-an mulai diperkenalkan di Indonesia. Sebagaimana akan ditunjukkan nanti bahwa pers itu merupakan salah satu institusi sosial yang penting dan berfungsi untuk memberikan *news and views* (berita dan opini) kepada masyarakat dan pemerintah. Karena fungsinya yang demikian, lembaga pers sering juga dipandang sebagai kekuatan demokrasi ke-4, di samping lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif (Hohenberg, 1968; dan Oetama, 1987).

Betapapun secara teoritis hubungan segi-tiga antara pers, pemerintah dan masyarakat itu merupakan kerangka relasi yang dinamis dan ideal, namun dalam kenyataannya hubungan antara pers dan pemerintahlah yang banyak menentukan corak kehidupan dan kebebasan pers di sebuah negara. Untuk kasus Indonesia yang baru memperoleh kemerdekaan penuh pada tahun 1950/1960-an, interaksi antara pers dan pemerintah sebagai penyelenggara negara demikian penting untuk difahami dan dianalisis mengingat implikasi-implikasinya dalam jangka panjang, yang akan turut menentukan corak kehidupan dan kebebasan pers di negeri ini.

KEHIDUPAN DAN KEBEBASAN PERS

Periode awal tahun 1950-an adalah merupakan masa “optimisme” bagi proses perwujudan “demokrasi” di Indonesia, karena beberapa saat sebelumnya – sejak proklamasi kemerdekaan – gambaran tentang masa depan demokrasi itu masih belum menentu (Ali, 1993:xvi). Masa-masa sesudah pengakuan kedaulatan pada akhir tahun 1949, masyarakat Indonesia juga ditandai oleh semangat *euphoria* tentang makna kemenangan kemerdekaan. Pemerintahan yang baru, Presiden dan Wakil Presiden, elite partai-partai politik, tentara (khususnya Angkatan Darat), dan juga tidak ketinggalan pers turut merasakan suasana itu yang ditandai oleh sikap-sikap, tindakan,

perasaan dan pandangan optimisme ke depan. Terutama pers, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat, suasana demokratis pada masa itu disikapi dengan cara-cara mengekspresikan kebebasan dan mengartikulasikan kepentingan sesuai dengan orientasinya masing-masing. Sikap dan pandangan pers yang “demokratis-liberal” ini, pada gilirannya nanti, banyak berhadapan dengan kepentingan politik penguasa yang menghendaki cara-cara mengelola pemerintahan yang efektif tanpa banyak gangguan dan batu sandungan dari pihak lain, terutama pers.

Suasana kehidupan pada masa Demokrasi Liberal juga ditandai oleh kebebasan para wartawan untuk menerbitkan pers. Boleh dikatakan bahwa siapapun yang memiliki modal, berupa uang, tidak peduli berasal dari golongan manapun atau menganut aliran dan ideologi politik apapun, dengan tanpa memerlukan izin dari siapapun dapat menerbitkan pers, khususnya surat kabar. Sementara itu pemerintah Indonesia sendiri memang mendorong usaha penerbitan pers, dengan cara memberikan bantuan modal, subsidi untuk kertas koran, alat-alat cetak dan berlangganan setiap surat kabar yang terbit (Sjahril & Sjureich, 1971:127). Usaha dari pemerintah ini berkaitan dengan kebutuhan untuk mendapatkan informasi dan pandangan yang menguntungkan bagi kepentingan dan kebijakan politik pemerintah Indonesia di tengah-tengah masih hidup suburnya pers Belanda dan pers Cina yang membawa suara dan orientasi politiknya masing-masing.

Data-data kuantitatif yang akurat tentang pers pada tahun 1950-an belum diketahui secara pasti. Namun secara umum dapat dikemukakan bahwa kondisi pers pada awal tahun 1950-an itu berkisar antara 75-104 surat kabar dengan sirkulasi berkisar antara 400.000–630.000 eksemplar. Lebih dari setengah surat kabar itu dalam bahasa Indonesia dan bahasa Daerah (Jawa dan Sunda), sedangkan selebihnya adalah surat-surat kabar dalam bahasa Belanda dan Cina (Smith, 1986:81 dan 91). Sementara itu kantor berita jumlahnya 1-2 buah, dan radio berada di kota-kota besar dengan daya pancar dan siaran yang masih terbatas. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 70.000.000 jiwa, dan sebagian besar terpusat di Jawa, maka keadaan pers – khususnya surat kabar – masih merupakan medium yang terbatas, hanya menjadi konsumsi dan efektif bagi kepentingan golongan menengah ke atas, yang jumlahnya juga kecil dalam struktur masyarakat Indonesia. Namun demikian, karena fungsinya sebagai sumber informasi serta kontrol sosial bagi pemerintah dan masyarakat, maka pers tetap penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kondisi pers pada masa itu sebagian merupakan kelanjutan dari pers yang lahir pada masa revolusi, sedangkan yang lainnya memang baru muncul pada tahun 1950-an. Bahkan ada beberapa pers yang lahir sejak zaman kolonial. Sekedar contoh, surat-surat kabar seperti *Merdeka*, *Berita Indonesia*, *Pedoman* dan *Indonesia Raya* di Jakarta; *Kedaulatan Rakjat* dan *Harian Nasional* di Yogyakarta; *Suara Rakjat* dan *Djawa Post* di Surabaya; *Waspada* di Medan; *Haluan* di Padang; serta *Pedoman Rakjat* di Makasar adalah merupakan pers yang terbit

sejak masa revolusi Indonesia. Pers yang lahir pada tahun 1950-an, di antaranya adalah surat kabar *Pikiran Rakjat* di Bandung; *Suara Merdeka* di Semarang; dan *Surabaya Post* di Surabaya. Sedangkan beberapa pers zaman kolonial yang masih terbit pada tahun 1950-an, di antaranya adalah *Pemandangan* dan *kantor berita Antara* di Jakarta; *Sipatahun* di Bandung; dan *Suara Umum* di Surabaya (Sjahril & Sjureich, 1971:181-258; dan Soebagijo I.N., 1977:29-34). Unsur-unsur kesinambungan dari masa lalu dan pengalaman revolusi di satu sisi, dengan suasana demokratis pada zamannya di sisi lain ternyata banyak memberikan andil bagi kehidupan dan pandangan pers yang bersemangat dan bebas pada tahun 1950-an.

Fenomena lain dari keadaan pers pada tahun 1950/1960-an adalah munculnya surat-surat kabar yang merupakan corong atau media dari sebuah kekuatan politik. Kehidupan pada tahun 1950/1960-an ditandai oleh munculnya kekuatan-kekuatan politik dari golongan nasionalis, agama, komunis dan tentara. Masing-masing kekuatan politik ini pada tahun 1950-an memiliki media untuk kepentingan mereka. Misalnya adalah surat kabar *Suluh Indonesia* milik PNI (Partai Nasional Indonesia), *Harian Abadi* milik Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia), *Duta Masyarakat* milik NU (Nahdatul Ulama), *Harian Rakjat* dan *Warta Bhakti* milik PKI (Partai Komunis Indonesia). Sedangkan pada tahun 1960-an TNI-AD (Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Darat) juga memiliki dan menerbitkan surat kabar seperti *Angkatan Bersendjata* dan *Berita Yudha*. Dalam konteks ini maka berita dan opini pers merupakan perpanjangan dari kebijakan dan program kekuatan politik yang mendukungnya. Persaingan dan pergumulan di antara kekuatan-kekuatan politik yang ada pada tahun 1950-an dan 1960-an itu juga tercermin dalam "perang pena dan perang suara" surat-surat kabar yang dimilikinya.

Selain terdapat pers partisan seperti di atas, ada juga pers yang relatif independen, dalam artian tidak memiliki ikatan formal dengan kekuatan politik tertentu. Namun ke dalam jenis pers semacam ini muncul sebutan *personal journalism*, yakni sebuah jurnalisme yang secara signifikan tampil di muka khalayak dengan suara dan sikap yang seirama dengan pikiran, pandangan dan idealisme pemimpin redaksinya (Suwirta, 2004:392). Contohnya adalah bahwa surat kabar *Merdeka*, *Indonesia Raya* dan *Pedoman* di Jakarta pada tahun 1950-an tidak bisa dipisahkan dari visi dan policy B.M. (Burhanuddin Muhammad) Diah, Mochtar Lubis, dan Rosihan Anwar (Atmakusumah, 1992:16-99; Said ed., 1992; dan Kakiailatu, 1997:135-145). Begitu juga dengan surat kabar di kota-kota penting lainnya di Jawa, seperti *Pikiran Rakjat* (Bandung), *Suara Merdeka* (Semarang), *Kedaulatan Rakjat* (Yogyakarta) dan *Surabaya Post* (Surabaya) jelas tidak bisa dipisahkan dari sosok-sosok pribadi Djamal Ali, Mohamad Hetami, Madikin Wonohito dan Abdul Azis (Soebagijo I.N., 1981:310-315; Hendrowinoto, 1985; Harsono, 1997:xv; dan Iskantini, 2002:77). Hal ini juga berlaku bagi pers yang terbit di luar Jawa, seperti surat kabar *Waspada* (Medan), *Haluan* (Padang) dan *Pedoman Rakjat* (Makasar) yang dalam banyak segi merupakan representasi dari pandangan dan kepentingan

Mohamad Said atau Ani Idrus, Kasuma dan L.E. Manuhua (Sjahril & Sjureich, 1971:236 dan 249). Tanpa harus mengabaikan anggota redaksi lainnya, peranan pimpinan redaksi dalam surat kabar itu sangat signifikan karena ia laksana nahkoda kapal yang bertanggung jawab terhadap arah perjalanan dan bahtera kehidupan awaknya. Ke mana saja arah kapal akan bergerak dan bagaimana cara menempuh perjalanan itu agar sampai pada tujuan yang diinginkan, nampaknya harus tetap dalam kerangka kebijakan dan pandangan dari nahkoda kapal tersebut (Gani, 1978:84).

Tentang tiras surat-surat kabar pada tahun 1950/1960-an nampaknya juga belum diperoleh data-data yang akurat. Jika tahun 1957 dianggap sebagai masa-masa puncak tiras pers Indonesia – hal ini disebabkan, antara lain, karena adanya nasionalisasi dan pensitaan terhadap pers berbahasa Belanda – maka jumlah surat kabar berbahasa Indonesia sebanyak 96 buah dengan tiras 1.022.000 eksemplar; surat kabar Cina sebanyak 17 buah dengan tiras 130.000 eksemplar; serta terdapat beberapa surat kabar berbahasa Inggris seperti *Indonesian Observer* (pimpinan Herawati Diah) dan *Times of Indonesia* (pimpinan Charles Tambu) dengan tiras sekitar 25.000 eksemplar (Smith, 1986:168). Berikut ini merupakan tabel kondisi pers yang dinilai penting pada tahun 1950/1960-an, termasuk perkiraan jumlah tirasnya, dari berbagai sumber:

No.	Nama Surat Kabar	Tempat dan Mulai Terbit	Perkiraan Jumlah Tiras
1.	<i>Merdeka</i>	Jakarta: 1 Oktober 1945	20.000 eksemplar
2.	<i>Berita Indonesia</i>	Jakarta: September 1945	10.000 eksemplar
3.	<i>Pedoman</i>	Jakarta: 29 Nopember 1948	48.000 eksemplar
4.	<i>Indonesia Raya</i>	Jakarta: 29 Desember 1949	47.500 eksemplar
5.	<i>Indonesian Observer</i>	Jakarta: 1 Oktober 1954	7.500 eksemplar
6.	<i>Times of Indonesia</i>	Jakarta: 1952	5.000 eksemplar
7.	<i>Keng Po</i>	Jakarta: 1947	39.000 eksemplar
8.	<i>Harian Abadi</i>	Jakarta: 2 Januari 1950	34.000 eksemplar
9.	<i>Suluh Indonesia</i>	Jakarta: 1953	40.000 eksemplar
10.	<i>Duta Masyarakat</i>	Jakarta: 2 Januari 1954	15.000 eksemplar
11.	<i>Harian Rakjat</i>	Jakarta: 1951	55.000 eksemplar
12.	<i>Pikiran Rakjat</i>	Bandung: 1 Juni 1950	16.000 eksemplar
13.	<i>Sipatahun</i>	Bandung: 20 April 1923	15.000 eksemplar
14.	<i>Suara Merdeka</i>	Semarang: 11 Februari 1950	5.000 eksemplar
15.	<i>Kedaulatan Rakjat</i>	Yogyakarta: 27 September 1945	15.000 eksemplar
16.	<i>Harian Nasional</i>	Yogyakarta: Desember 1945	7.500 eksemplar
17.	<i>Surabaya Post</i>	Surabaya: 1 April 1953	15.000 eksemplar
18.	<i>Suara Rakjat</i>	Surabaya: 1 Oktober 1945	14.000 eksemplar.
19.	<i>Waspada</i>	Medan: 11 Januari 1947	10.000 eksemplar
20.	<i>Haluan</i>	Padang: 1 April 1948	7.500 eksemplar
21.	<i>Kalimantan Berjuang</i>	Barjarmasin: 1 November 1946	5.000 eksemplar
22.	<i>Pedoman Rakjat</i>	Makasar: 1 Maret 1947	5.000 eksemplar

Catatan: Sumber-sumber yang digunakan untuk memperkirakan jumlah tiras surat-surat kabar tersebut adalah berasal dari Soebagijo I.N. (1977:95-119); Smith (1986:92-95); Said (1988:94); Krisnawan (1997:31); dan Iskantini (2002:79).

Dari tabel di atas nampak bahwa rata-rata jumlah tiras pers Indonesia pada tahun 1950/1960-an kurang dari angka 100.000 eksemplar. Namun yang harus difahami adalah bahwa tradisi membaca surat kabar dalam masyarakat Indonesia itu sifatnya berantai. Satu surat kabar biasanya dibaca oleh lebih dari 2 orang. Dengan demikian jika surat kabar tersebut jumlah tirasnya 50.000 eksemplar, misalnya, mungkin saja telah dibaca oleh sekitar 200.000 orang. Lagi pula pers tetap dinilai penting oleh pemerintah dan masyarakat, karena selain unsur berita (*news*) yang bersifat faktual juga opini (*views*) yang disajikan dalam kolom tajuk rencana, karikatur dan catatan pojoknya. Dalam konteks ini juga bisa difahami jika pandangan dari orang-orang pers yang bemodalkan pena ini bisa lebih tajam daripada kekuatan bersenjata. Namun dari tabel di atas juga perlu ada catatan tambahan bahwa para pemimpin redaksi pers umumnya sengaja meningkatkan klaim tiras surat kabarnya dengan harapan semakin besar jumlah tiras akan semakin besar bantuan modal dan subsidi kertas koran dari pemerintah (Siahaan & Purnomo W. eds., 1993:69).

Selanjutnya, untuk bisa memahami kebebasan pers pada tahun 1950-an nampaknya harus dilihat pada beberapa faktor. *Pertama*, pers Indonesia sering membanggakan dirinya sebagai “pers perjuangan” dengan sikap kritisisme dan advokasinya yang jelas pada penyalahgunaan kekuasaan dan demokrasi. *Kedua*, hubungan pers dan pemerintah pada tahun 1950-an masih sedang mencari *modus vivendi* di mana aturan yang mengekang pers di satu sisi ingin dihapuskan, namun di sisi lain pemerintahan yang berwibawa, stabil dan aman juga ingin ditegakkan. Dan *ketiga*, para pimpinan redaksi pers umumnya adalah orang-orang muda, generasi yang lahir tahun 1910-an dan 1920-an, yang pada tahun 1950-an mereka berusia rata-rata 40 dan 30 tahunan.¹ Para pimpinan redaksi seusia ini, secara psikologis, merasa tidak ada beban dan takut untuk mengkritik dan mengingatkan para pejabat pemerintah dan tentara – umumnya merupakan generasi yang sederajat atau setingkat di atas mereka – yang lahir pada tahun 1900/1910-an. Ditambah lagi dengan suasana pada tahun 1950-an, di mana kemerdekaan baru saja dimenangkan dengan cara-cara terhormat dan membanggakan, maka dambaan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan egalitarian, termasuk kehidupan persnya, adalah merupakan aspirasi sosial yang tak terbantahkan.

Secara konstitusi, kebebasan pers juga dijamin oleh UUDS (Undang-Undang Dasar Sementara) 1950 pasal 19 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengemukakan pendapat” (Nasution

¹Lihat, misalnya, tahun kelahiran pimpinan surat-surat kabar di Jakarta: B.M. Diah (*Merdeka*) lahir 1917; Mochtar Lubis (*Indonesia Raya*) lahir 1922; Rosihan Anwar (*Pedoman*) lahir 1922; dan Suardi Tasrif (*Harian Abadi*) lahir 1922. Sementara itu tahun kelahiran pimpinan surat-surat kabar di daerah adalah Djamal Ali (*Pikiran Rakjat*, Bandung) lahir 1917; Mohamad Hetami (*Suara Merdeka*, Semarang) lahir 1920; Madikin Wonohito (*Kedaulatan Rakjat*, Yogyakarta) lahir 1912; Abdul Azis (*Surabaya Post*, Surabaya) lahir 1922; Kasuma (*Haluan*, Padang) lahir 1911; dan bahkan Ani Idrus (*Waspada*, Medan) lahir 1933. Tentang biodata para pimpinan pers ini selanjutnya, lihat Soebagijo I.N. (1981:221); dan Kurniawan Junaedhie (1991).

(1995:525).² Kemudian pada tanggal 17 Maret 1950 pemerintah, bersama-sama dengan pers dan golongan cendekiawan, sepakat untuk membentuk Dewan Pers yang bertugas untuk: (1) mengganti undang-undang pers yang lama peninggalan zaman kolonial Belanda; (2) memberikan dasar-dasar sosial-ekonomi yang kuat kepada pers Indonesia, termasuk fasilitas kredit dan bantuan pemerintah; (3) meningkatkan mutu jurnalisme di Indonesia; dan (4) mengatur kedudukan sosial dan hukum bagi wartawan Indonesia, termasuk tingkat hidup dan gaji, perlindungan hukum dan etika jurnalistik (Smith, 1986:95). Pada tahun 1954 pemerintah juga akhirnya menghapuskan *Persbreidel Ordonnantie* (Undang-Undang Pembredelan Pers) yang sudah berlaku dan diterapkan sejak zaman kolonial. Namun dalam perkembangan kemudian, sebagaimana akan ditunjukkan nanti, karena situasi keamanan yang semakin memburuk dan strategi pilihan pada corak Demokrasi Terpimpin pada akhir tahun 1950-an maka pers mendapat tekanan dan pembredelan kembali melalui pasal-pasal “karet” tentang penghinaan dan kebencian (*haatzaai artikelen*) dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) peninggalan kolonial Belanda dan melalui undang-undang negara dalam keadaan bahaya atau SOB, *Staat van Oorlog en Beleg* (Surjomihardjo et al., 2002:190-191).

Tentang kehidupan dan kebebasan pers selama kurun waktu 1950-1965, kiranya dapat dibagi ke dalam tiga fase sebagai berikut: (1) fase pers liberal, sejak pengakuan kedaulatan RI sampai dengan diberlakukannya SOB pada tahun 1957; (2) fase pers terpimpin, sejak pers dikontrol secara ketat oleh tentara dan pemerintah sampai dengan dicabutnya SOB pada tahun 1963; dan (3) fase pers terkooptasi oleh pemerintah, ketika pers mengalami proses “manipolisasi dan nasakomisasi” pada masa Demokrasi Terpimpin sampai dengan tahun 1965 (Smith, 1986:156 dan 204). Fase-fase tersebut dibuat hanya untuk kepentingan kategorisasi dan analisis, sebab dalam kenyataannya pers terus berjuang untuk mendapatkan kembali kebebasan dalam negara Indonesia yang telah turut dibayangkan (*imagined*) dan diwujudkan bersama. Dalam hal ini mungkin ada benarnya pendapat yang mengatakan bahwa kebebasan pers di Indonesia adalah termasuk barang langka sejak zaman kolonial hingga zaman Indonesia merdeka, kecuali fase-fase “bebas” pada awal kemerdekaan dan tahun-tahun pertama sejak pengakuan kedaulatan pada tahun 1950-an (Smith, 1986:243; dan Suwirta, 2001).

Melihat kembali fase kebebasan pers pada tahun 1950-an dapat ditelusuri dari sajian berita utama, analisa berita, tajuk rencana, catatan pojok dan karikatur yang ditampilkannya. Analisis terhadap berita dan opini pers itu dapat bersifat *favourable* (mendukung), *unfavourable* (tidak mendukung) dan netral (Flournoy ed., 1989:131). Bahwa pers Indonesia umumnya mendukung

²Dibandingkan dengan UUD 1945 pasal 28, yang sering dirujuk sebagai legalitas kebebasan pers, UUDS pasal 19 ini lebih liberal karena tiadanya kata-kata tambahan “diatur oleh Undang-Undang”, di mana pemerintah biasanya lebih dominan dalam mengambil inisiatif untuk membuat undang-undang dibandingkan dengan badan-badan legislatif atau yudikatif. Lihat juga Yasuo Hanazaki (1998:37-39).

kebijakan dan program yang diselenggarakan oleh pemerintah pada tahun 1950-an nampak dalam peristiwa Konferensi Asia-Afrika di Bandung (18-24 April 1955); Pemilihan Umum tahun 1955; operasi penumpasan gerakan DI/TII (Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia) di Jawa Barat, Aceh dan Sulawesi Selatan; serta usaha mengembalikan Irian Barat ke pangkuan wilayah Indonesia pada tahun 1960-an. Dukungan itu diberikan karena pers memandang bahwa kebijakan pemerintah tersebut sebagai suatu tindakan yang menguntungkan secara nasional, menambah kebanggaan dan kewibawaan nasional, serta memperkuat persatuan nasional. Hanya pers Belanda yang bersikap netral, atau malah tidak mendukung, terhadap kebijakan-kebijakan politik pemerintah Indonesia pada tahun 1950/1960-an. Hal ini akan membawa implikasi yang serius, di mana sejak pemerintah mengambil kebijakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing pada akhir tahun 1950-an, maka surat-surat kabar Belanda seperti: *De Java Bode*, *Het Nieuws van den Dag*, dan *De Nieuwsgier* (Jakarta); *A.I.D. de Preanger Bode* (Bandung); *De Locomotief* (Semarang); serta *De Vrije Pers* dan *Nieuw Soerabaiasch Handelsblad* (Surabaya) tidak diperbolehkan terbit lagi di Indonesia.

Namun bagi pers Indonesia, di balik berita dan opini pers yang bersifat mendukung itu ia juga tetap bersifat kritis terhadap peristiwa atau kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan kepentingan umum dan tidak sesuai dengan etika kehidupan berdemokrasi. Sebagai sebuah institusi, fungsi utama pers memang tidak hanya menyediakan informasi, tetapi juga melakukan kontrol sosial kepada pemerintah dan masyarakat. Karena itu masalah-masalah yang berkenaan dengan: kasus MSA (*Mutual Security Act*) berupa bantuan kerjasama ekonomi dan militer dari Amerika Serikat kepada Kabinet Sukiman; peristiwa 17 Oktober 1952 di mana tentara memaksakan kehendaknya kepada Presiden Soekarno untuk membubarkan Parlemen pada masa Kabinet Wilopo; sekitar poligami antara Presiden Soekarno dengan Hartini pada tahun 1954; kasus prostitusi terselubung oleh *Hospitality Committee* (Panitia Ramah-Tamah) pada acara KAA (Konferensi Asia-Afrika) di Bandung tahun 1955; skandal korupsi para pejabat negara dan perwira militer; serta peristiwa pemberontakan di daerah-daerah (Sumatera dan Sulawesi) menentang otoritas pemerintah pusat (Jakarta) pada tahun 1957, disorot secara bebas dan tajam oleh pers Indonesia. Masing-masing pers, dengan gaya dan caranya sendiri-sendiri, memberitakan dan memberikan tanggapan, baik opini maupun kritik, kepada setiap kasus yang dinilai penting menurut kepentingan para pimpinan redaksinya.

Kritik pers terhadap penyalahgunaan kekuasaan ditunjukkan oleh *Merdeka* di Jakarta pada tahun 1952. Surat kabar pimpinan B.M. Diah ini menuduh Menteri Perekonomian, Dr. Sumitro Djojohadikusumo, pada masa Kabinet Sukiman melakukan penjualan besi tua bekas peninggalan Perang Dunia II di daerah Morotai, Maluku, tanpa pertanggungjawaban yang jelas. Gambar karikatur *Merdeka* yang berjudul "Harta Karun Morotai" dinilai menghina dan merugikan nama baik Dr. Sumitro (Sjahlil & Sjureich, 1971:126). Karenanya ia

menggugat ke Pengadilan Negeri di Jakarta dan mengejek surat kabar *Merdeka* sebagai “pers kuning” (*yellow paper*), dalam artian warna berita dan opini yang disajikannya lebih bersifat sensasional, murahan dan tidak objektif.³ Mendapat ejekan seperti itu B.M. Diah balik menggugat karena surat kabar *Merdeka*, menurutnya, adalah pers yang kredibel dan dihormati sejak zaman revolusi Indonesia. Betapapun akhir dari kasus ini tidak jelas sampai dengan terjadi pergantian kabinet, namun masalah hubungan antara pers dengan pemerintah masih dapat dilakukan melalui jalur hukum dan peraturan yang disepakati bersama.

Jatuhnya Kabinet Sukiman (26 April 1951 – 23 Februari 1952) dalam banyak segi juga karena sorotan dan kritikan pers (Feith, 1962:200-206). Dalam hal ini peranan surat-surat kabar seperti *Indonesia Raya* (pimpinan Mochtar Lubis), *Harian Abadi* (pimpinan Suardi Tasrif) dan *Pedoman* (pimpinan Rosihan Anwar) tidak bisa diabaikan. Kabinet ini jatuh karena, salah satunya, kebijakan Menteri Luar Negeri Mr. Subardjo Djojoadisuryo yang melakukan penandatanganan MSA berupa bantuan ekonomi dan militer dari Amerika Serikat (Gardner, 1999:210-220). Kebijakan tersebut dinilai oleh pers sebagai penyimpangan dari haluan politik luar negeri RI yang bebas-aktif, di mana dasar-dasar pemikiran dan kebijakannya telah diterapkan oleh Mohamad Hatta pada masa revolusi Indonesia (Hatta, 1988). Ketika masalah ini ramai disorot oleh pers dan akan menjadi pembicaraan umum di parlemen, Kabinet Sukiman memilih mundur. Dalam hal ini surat kabar *Pedoman* menurunkan berita utama, dalam rangka menyambut kejatuhan Kabinet Sukiman tersebut, dengan judul “Kemenangan bagi Pers” (*Pedoman*, 24/2/1952:1).

Peristiwa 17 Oktober 1952 juga mendapat sorotan tajam dari pers. Dalam hal ini surat kabar *Merdeka* (pimpinan B.M. Diah) sangat keras mengecam perilaku politik para perwira Angkatan Darat (khususnya dari Divisi Siliwangi) yang memaksakan kehendaknya kepada Presiden Soekarno untuk membubarkan Parlemen. Peristiwa 17 Oktober 1952 ini merupakan salah satu penyebab jatuhnya Kabinet Wilopo, yang memerintah dari 1 April 1952 hingga 2 Juni 1953 (Sophiaan, 1979:291-300). Menanggapi peristiwa itu, surat kabar *Merdeka* – dalam tajuk rencananya – memuji keberanian dan kepemimpinan Presiden Soekarno (betapapun di bawah tekanan demonstrasi massa dan ancaman moncong senjata panser yang diarahkan ke pintu Istana) di satu sisi, dan di sisi lain mengkritik perilaku politik tentara (dengan mengobrak-abrik gedung Parlemen) yang otoriter dan tidak demokratis (*Merdeka*, 18/10/1952; dan 20/10/1952). Dan ketika surat kabar *Merdeka* dan juga *Berita Indonesia* (keduanya pada tahun 1950-an milik B.M. Diah) terkena kemarahan tentara, dengan merusak kantor redaksi tersebut dan menutupnya pada tanggal 18-19 Oktober 1952, surat-surat kabar ini menentang dengan keras. Dalam pandangan

³Menurut Soebagijo I.N. (1977:96-97), istilah *yellow paper* adalah [...] means a highly sensational kind of newspaper writing; suatu jenis penulisan jurnalistik yang terlampau amat sensasional. Dan para pembaca pers di Indonesia umumnya menyebut sebagai “koran got” atau “koran comberan”, dalam artian tidak berguna dan menjijikkan.

Merdeka, yang merasa punya “saham revolusi” itu tidak hanya tentara, kalangan pers pun berjasa besar dalam menegakkan negara proklamasi kemerdekaan RI. Kemudian, untuk mengenang peristiwa yang tidak menyenangkan tersebut (tindakan tentara yang semena-mena menutup penerbitan pers) maka pada tahun berikutnya, 17 Oktober 1953, *Merdeka* menurunkan catatan pojok (*Notes Dr. Clenik*) yang berjudul “Hari Berkabung” (*Merdeka*, 17/10/1953).

Masalah lain yang disorot oleh pers adalah skandal tentang poligami Presiden Soekarno dalam perkawinannya dengan Hartini pada tahun 1954; kasus prostitusi terselubung oleh *Hospitality Committee* dalam KAA di Bandung pada tahun 1955; dan masalah korupsi dan kolusi di tubuh birokrasi dan tentara pada tahun 1956. Masalah-masalah tersebut banyak disorot oleh surat kabar *Indonesia Raya*, *Harian Abadi*, *Merdeka* dan *Pedoman*. Dalam hal ini khususnya *Indonesia Raya* adalah merupakan surat kabar yang kontroversial karena keberaniannya dalam cara mengkritik yang tanpa *tedeng aling-aling*, keras dan bahkan vulgar terhadap pihak-pihak yang dipandang secara moral tidak benar dan menyalahi etika dalam kehidupan berdemokrasi (Haryanto, 1996). Tajuk-tajuk rencana yang tajam – biasanya ditulis langsung oleh Mochtar Lubis – dan beberapa sajian karikatur dengan kandungan kritikan sosial, serta kolom catatan pojoknya yang sarat dengan humor dan sarkasme (*Mas Kluyur: Di Pinggir Jalan*) merupakan ciri khas surat kabar *Indonesia Raya*. Karena keberanian dan kenekadannya dalam melakukan kritik-kritik sosial, surat kabar ini sering mendapat julukan sebagai “pers jihad” (Atmakusumah ed., 1992). Mochtar Lubis sendiri memang sering dipandang sebagai pimpinan redaksi *Indonesia Raya* yang independen, pemberani dan keras kepala; serta acapkali melihat dunia di sekitarnya dengan paradigma hitam-putih. Pandangan semacam ini dinilai sebagai tidak taktis untuk kepentingan kehidupan pers yang mapan ke depan (Oetama, 1992:9-15).

Menelanjangi skandal-skandal pribadi seperti poligami dan prostitusi terselubung, sampai dengan masalah korupsi dan kolusi pejabat negara, serta penyelundupan oleh pihak tentara dalam suasana Indonesia yang baru merdeka dan masih harus banyak belajar dalam mengelola negara, acapkali menimbulkan ketidaksenangan dan reaksi balik dari pihak-pihak yang menjadi sasaran kritik pers. Para pejabat negara dan tentara umumnya bersikap tidak senang dan marah apabila dikritik oleh pers. Tidak terkecuali dengan Presiden Soekarno, yang merasa jengkel dan geram terhadap “pers liberal” karena telah mempermalukan dan membunuh kepala negaranya untuk ditonton oleh masyarakat dunia (Adams, 1966:413). Sementara itu Roeslan Abdulgani, pejabat yang dituduh merestui praktek prostitusi terselubung dalam acara malam ramah-tamah penyambutan tamu KAA di Bandung tahun 1955 dan melakukan tindakan korupsi dan kolusi dengan pengusaha Cina pada tahun 1956, menilai pers terlalu tendensius dan sensasional dalam menyajikan *news and views*-nya. Sikap para pejabat negara ini, dan juga tentara, untuk sementara waktu masih bisa menahan diri dari tindakan untuk membungkam kritik-kritis pers yang keras, setidaknya sampai dengan akhir tahun 1950-an.

Sementara itu surat kabar *Pedoman* dan *Harian Abadi*, selain menyuarakan pentingnya kehidupan yang lebih demokratis juga menekankan agar pemerintah pusat di Jakarta memperhatikan aspirasi dan tuntutan kepentingan yang berkembang di daerah. Pimpinan redaksi surat kabar *Pedoman*, Rosihan Anwar, betapapun mengklaim dirinya sebagai jurnalis independen namun sering dinilai banyak menyuarakan pandangan dan pemikiran politik PSI (Partai Sosialis Indonesia) pimpinan Sutan Sjahrir (Anwar, 1983:182-186). Demikian halnya dengan surat kabar *Harian Abadi*, milik partai politik Masyumi, yang dipimpin oleh Suardi Tasrif dalam banyak segi tidak bisa dilepaskan dari bayang-bayang pengaruh tokoh Masyumi seperti Mohammad Natsir, Sjafruddin Prawiranegara, Burhanuddin Harahap dan Mohamad Roem. Tokoh-tokoh ini sejak masa revolusi Indonesia memang lebih dekat dengan Sutan Sjahrir dan mendapat sebutan sebagai kelompok "sosialisme religius" dalam tubuh Masyumi (Noer, 1987:185). Kedua surat kabar ini, *Pedoman* dan *Harian Abadi*, dalam perkembangannya juga akan hilang dari peredaran pada tahun 1960-an bersamaan dengan memudarnya pamor politik PSI dan Masyumi.

Ketika terjadi pergolakan di daerah menentang pemerintah pusat Jakarta pada tahun 1956-1957 – dengan didirikannya dewan-dewan pimpinan tentara (Dewan Gajah di Sumatera Utara, Dewan Banteng di Sumatera Tengah, dan Dewan Garuda di Sumatera Selatan) – banyak pers yang mengingatkan tentang perlunya pemerintah tetap berada dalam koridor kehidupan yang demokratis dan berkeadilan. Tanda-tanda kehidupan politik yang makin kusut memang nampak pada tahun 1956 ini. Pemilihan Umum (PEMILU) tahun 1955 tidak menghasilkan partai politik yang menang secara dominan. Presiden Soekarno mulai menggagas perlunya sistem demokrasi terpimpin untuk menggantikan sistem demokrasi parlementer yang liberal. Wakil Presiden Mohamad Hatta, karena merasa tidak cocok dengan visi tentang pemerintahan terpusat yang digagas oleh Soekarno, meletakkan jabatannya pada akhir tahun 1956 (Noer, 1990:485-486). Semua peristiwa politik yang penting dan aktual pada zamannya itu disorot, dijadikan berita, ditanggapi secara kritis dan bebas oleh pers.

Dalam hal ini surat-surat kabar yang terbit di Jakarta seperti *Pedoman*, *Indonesia Raya*, *Harian Abadi*, *Times of Indonesia*; juga surat kabar di daerah seperti *Haluan* (Padang) dan *Waspada* (Medan) memberikan perhatian yang besar terhadap peristiwa-peristiwa pergolakan di daerah. Surat-surat kabar yang lain, seperti *Merdeka*, *Suluh Indonesia*, *Duta Masyarakat* dan *Harian Rakjat*, umumnya memberikan dukungan kepada pemerintah pusat di Jakarta (Presiden Soekarno, Perdana Menteri dan Angkatan Darat) untuk bertindak tegas terhadap usaha-usaha yang bisa mengganggu jalannya persatuan nasional. Dan ketika pada tahun 1957 diselenggarakan Musyawarah Nasional antara pemerintah pusat dan panglima-panglima tentara di daerah yang sedang bergolak, termasuk dihadiri juga oleh Mohamad Hatta, pihak pers turut memberikan perhatian dan harapan yang besar terhadap hasil musyawarah tersebut agar masalah kemelut kepemimpinan nasional dapat segera diatasi. Namun ketika pers memberikan *views and news*-nya, tanpa melalui juru bicara

resmi dari panitia Musyawarah Nasional, pemerintah dan tentara memberikan tindakan keras, yakni menutup beberapa penerbitan surat kabar.⁴ Tindakan pemerintah dan tentara ini merupakan awal dari mimpi buruk tentang kebebasan pers di Indonesia.

TEKANAN TERHADAP PERS

Tahun 1956 sering digambarkan oleh kalangan pers sebagai awal dari masa suram kehidupan demokrasi di Indonesia, termasuk kebebasan pers. Pamor kehidupan dan kebebasan politik pada masa Demokrasi Liberal akan segera berakhir, untuk segera digantikan oleh sistem politik baru yang lebih “terpimpin” dan otoriter. Pergolakan internal dalam tubuh tentara Angkatan Darat, terutama para perwira menengah yang pada akhirnya mengambil alih pemerintahan di daerah, semakin memperparah kemelut kehidupan politik di Indonesia. Atas nama dan demi keamanan-ketertiban maka TNI-AD di Jakarta – dengan didukung oleh pemerintah (Perdana Menteri Djuanda) dan direstui oleh Presiden Soekarno – memberlakukan negara dalam keadaan bahaya (SOB, *Staat van Oorlog en Beleg*) pada tahun 1957. Perangkat perundang-undangan tentang SOB ini telah tersedia sebagai warisan hukum kolonial, yang memberikan kekuasaan tanpa batas kepada pemerintah dan tentara, termasuk untuk mengatur dan mengendalikan kehidupan pers (Surjomihardjo *et al.*, 2002:90-91).

Langkah awal penguasa untuk mengatur dan mengendalikan kehidupan pers terjadi pada tanggal 1 Oktober 1958 ketika Penguasa Perang Daerah (PEPERDA) Jakarta Raya mewajibkan semua penerbitan pers di daerahnya untuk mendapatkan Surat Izin Cetak (SIC). Dengan peraturan ini penguasa di Jakarta bisa menentukan mana pers yang layak mendapatkan SIC atau tidak. Kepada pers yang moderat dan akomodatif dengan kepentingan politik pemerintah dan tentara, tentu saja akan dengan mudah untuk mendapatkan SIC. Sebaliknya, bagi pers yang bersikap keras dan oposisional, jangan berharap bisa dengan mudah untuk mendapatkan SIC. Dan kasus *Indonesia Raya* menjadi jelas bahwa penguasa tidak memberikan SIC kepada surat kabar pimpinan Mochtar Lubis ini mengingat kritik-kritik dan pandangannya yang tajam kepada penguasa. Penguasa akhirnya hanya memberikan SIC kepada Hasjim Mahdan, untuk memimpin *Indonesia Raya* agar berpandangan moderat, namun surat kabar ini tidak lama usianya dan harus menghentikan penerbitannya pada bulan November 1958 (Haryanto, 1996:78-79). *Indonesia Raya* memang tidak bisa dipisahkan dari pribadi Mochtar Lubis, dan tokoh pers yang keras kepala dan pemberani ini lebih memilih membiarkan *Indonesia Raya* mati daripada harus tunduk kepada kepentingan politik penguasa.⁵

⁴Pers yang dibredel oleh penguasa militer di Jakarta tersebut adalah 10 surat kabar (*Pedoman, Indonesia Raya, Merdeka, Harian Abadi, Harian Rakjat, Bintang Timur, Keng Po, Djawa Baru, Pemuda* dan *Java Bode*); serta 3 kantor berita (*Antara, INSP* dan *PIA*). Selanjutnya lihat Smith (1986:163).

⁵Selama ditahan dan dipenjara, tanpa melalui proses pengadilan, Mochtar Lubis terus menulis dan kemudian dibukukan menjadi *Catatan Subversif* (1987).

Serikat Perusahaan Surat kabar (SPS), sebuah organisasi penerbitan pers yang berdiri sejak revolusi Indonesia (8 Juni 1946), menilai kebijakan PEPERDA Jakarta Raya itu sebagai tanda matinya kebebasan pers di Indonesia. Surat kabar yang masih terbit harus mengikuti kehendak penguasa, karena bisa saja sewaktu-waktu SIC itu dicabut oleh penguasa. Wartawan Indonesia dalam melaksanakan tugasnya juga tidak lagi leluasa, karena selalu dibayang-bayangi oleh ancaman pencabutan SIC tersebut. Pada zaman kolonial Belanda, betapapun terdapat kontrol yang keras terhadap pers tetapi tidak diberlakukan izin terbit ini. Mungkin belajar dari pengalaman pemerintahan militer Jepang di Indonesia (1942-1945), semua pers harus dikontrol sepenuhnya oleh pemerintah untuk kepentingan propaganda dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh penguasa. Dengan demikian sejak tanggal 1 Oktober 1958, pers Indonesia bukan lagi sebagai salah satu lembaga yang menjalankan proses demokratisasi, melainkan hanya sebagai alat untuk membenarkan tindakan-tindakan politik penguasa; atau paling sedikit tidak mengkritik penguasa (Sjahril & Sjureich, 1971:123).

Pemerintah dan tentara memang tidak bermaksud surut untuk mengendalikan pers. Kebijakan PEPERDA Jakarta Raya itu kemudian oleh PEPERTI (Penguasa Perang Tertinggi) diberlakukan di semua wilayah Indonesia pada tahun 1959. Inilah awal dari sebuah periode yang dikenal sebagai "pers terpimpin", mengikuti sistem politik Demokrasi Terpimpin yang diberlakukan oleh Presiden Soekarno melalui dekritnya pada tanggal 5 Juli 1959, di mana tidak ada lagi kebebasan untuk mengkritik penguasa (dalam hal ini Presiden, pejabat negara dan tentara). Bahkan peraturan demi peraturan untuk mengendalikan pers terus diberlakukan pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 1960, misalnya, pemerintah mengeluarkan peraturan baru agar pers mengajukan permohonan izin penerbitannya, dengan menandatangani "19 Pernyataan" untuk setia, mendukung, membela, taat, patuh, membantu, menjadi alat, tidak memuat berita sensasional dan menghina pejabat negara.⁶

⁶Bunyi selengkapnya tentang Peraturan PEPERTI No.10 Tahun 1960 tentang Izin Penerbitan Surat Kabar dan Majalah itu, terutama Lampirannya, berbunyi: "Jika penerbitan yang kami sebutkan di atas ini mendapatkan izin terbit, kami nyatakan dengan sesungguhnya, bahwa: (1) Kami sanggup mematuhi pedoman-pedoman yang telah dan/ atau akan dikeluarkan/diberikan oleh Penguasa Perang Tertinggi dan lain-lain instansi pemerintah yang berwenang mengenai penerbitan; (2) Penerbitan kami wajib menjadi pendukung dan pembela manifesto politik RI secara keseluruhan; (3) Penerbitan kami wajib menjadi pendukung dan pembela program pemerintah; (4) Penerbitan kami wajib menjadi pendukung dan pembela Dekrit Presiden 5 Juli 1959; (5) Penerbitan kami wajib menjadi pendukung dan pembela Undang-Undang Dasar 1945; (6) Penerbitan kami wajib menjadi pendukung dan pembela Pancasila; (7) Penerbitan kami wajib menjadi pendukung dan pembela Sosialisme Indonesia; (8) Penerbitan kami wajib menjadi pendukung dan pembela Demokrasi Terpimpin; (9) Penerbitan kami wajib menjadi pendukung dan pembela Ekonomi Terpimpin; (10) Penerbitan kami wajib menjadi pendukung dan pembela martabat Negara Republik Indonesia; (11) Penerbitan kami wajib menjadi pendukung dan pembela Negara Republik Indonesia; (12) Penerbitan kami wajib menjadi alat untuk memberantas imperialisme dan kolonialisme, liberalisme, federalisme/separatisme; (13) Penerbitan kami wajib menjadi pembela/pendukung dan alat pelaksana dari politik bebas dan aktif Negara

Bagi pers yang tidak setuju dengan peraturan dan arus utama sistem politik Demokrasi Terpimpin ini lebih memilih menghentikan penerbitannya, seperti nampak dalam kasus surat kabar *Harian Abadi* milik Masyumi. Dalam tajuk rencananya berjudul "Pamitan" pada tanggal 31 Oktober 1960, *Harian Abadi* menegaskan bahwa surat kabar ini memilih "pamit" untuk tidak lagi menemui para pembacanya karena suasana untuk menyatakan pendapat di Indonesia, yang merupakan sangat prinsipil sifatnya dalam Hak Asasi Manusia, sudah tidak ada lagi (*Harian Abadi*, 31/10/1961). Sementara surat kabar lain lebih memilih jalan selamat, dengan tunduk pada peraturan pemerintah dan mau menandatangani "19 Pernyataan" untuk taat dan setia kepada penguasa. Dalam hal ini menarik untuk melihat kasus surat kabar *Pedoman* milik Rosihan Anwar. Betapapun pimpinan surat kabar ini menandatangani juga pernyataan tersebut – dan menyebabkan polemik antara Rosihan Anwar dengan Mochtar Lubis – namun pada akhirnya *Pedoman* harus menghentikan penerbitannya pada tanggal 7 Januari 1961, karena corak pemberitaan dan pandangannya yang tetap kritis, dinilai mengganggu keamanan-ketertiban oleh penguasa, serta dikait-kaitkan dengan kekuatan politik yang telah dibubarkan oleh pemerintah, yakni PSI pimpinan Sutan Sjahrir.⁷

Tahun 1960-an, dengan demikian, tekanan terhadap pers yang bebas di Indonesia semakin keras. Kekuatan-kekuatan politik yang muncul dalam panggung kekuasaan pada masa Demokrasi Terpimpin ini adalah kekuatan segi-tiga antara Presiden Soekarno, TNI-AD dan Partai Komunis Indonesia atau PKI (Feith, 1995:135-152). Dalam hal ini Presiden Soekarno, aura kekuasaannya semakin efektif dan besar, dengan kegemarannya berpidato dan membuat akronim slogan-slogan yang hebat seperti: MANIPOL-USDEK, NASAKOM, TRI KORA, RESOPIM, BERDIKARI, TAVIP, termasuk juga GANEF0 dan OLDEFO.⁸ Akronim dari slogan-slogan ini bagi kalangan pers

Republik Indonesia serta tidak menjadi pembela/pendukung dan alat dari pada perang dingin antar blok Negara Asing; (14) Penerbitan kami wajib menjadi alat untuk memupuk kepercayaan rakyat Indonesia terhadap Manifesto Politik RI; (15) Penerbitan kami wajib menjadi alat untuk memupuk kepercayaan rakyat Indonesia terhadap Pancasila; (16) Penerbitan kami wajib membantu usaha penyelenggaraan ketertiban dan keamanan umum serta ketenangan politik; (17) Penerbitan kami tidak akan memuat tulisan-tulisan atau lukisan-lukisan atau gambar-gambar yang bersifat sensasional dan merugikan akhlak; (18) Penerbitan kami tidak akan memuat tulisan-tulisan, lukisan-lukisan atau gambar-gambar yang mengandung penghinaan terhadap Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan dari negara asing yang bersahabat dengan Negara Republik Indonesia; dan (19) Penerbitan kami tidak akan memuat tulisan-tulisan, lukisan-lukisan atau gambar-gambar yang mengandung pembelaan terhadap organisasi yang dibubarkan atau dilarang berdasarkan Penetapan Presiden No.7 tahun 1959 dan Peraturan Presiden No.13 tahun 1960. Selanjutnya lihat Said (1988:125-126); dan Surjomihardjo *et al.* (2002:373-374).

⁷Setelah surat kabarnya dibredel, Rosihan Anwar juga terus menulis dan kemudian dibukukan menjadi *Sebelum Prahara: Pergolakan Politik Indonesia, 1961-1965* (1981). Tentang penutupan surat kabar pimpinan Rosihan Anwar ini, lihat Mahidin M. (1992:111-128).

⁸Kepanjangan dari masing-masing akronim tersebut adalah: MANIPOL-USDEK (Manifesto Politik tentang Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme, Demokrasi, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Nasional); NASAKOM (Nasionalis, Agama dan Komunis);

asing sangat membingungkan dan perlu kamus khusus untuk memahaminya. Bagi pers Indonesia sendiri, slogan-slogan itu – terutama MANIPOL-USDEK – merupakan panduan yang harus diikuti dan diterima begitu saja tanpa sikap kritis, sebagaimana yang dikehendaki oleh penguasa. Memang, bagi para pendukung kekuasaan Presiden Soekarno, MANIPOL-USDEK itu dianggap sebagai *Manifest Destiny* (Manifes Takdir), sebagai sebuah berkah yang tidak bisa dibantah. Namun bagi para penentangannya ia dipandang sebagai *Manifold Irony* (Ironi Berlipat-ganda), karena tidak masuk akal, saling bertentangan dan sarat dengan slogan (Smith, 1986:199). Presiden Soekarno memang sedang menuju puncak kekuasaan dan ingin menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi bangsa ini dengan aneka lambang, slogan dan pidato yang berapi-api.

Radio Republik Indonesia (RRI), yang berdiri pada masa revolusi Indonesia (September 1945), memegang peranan penting dalam menyiarkan pidato-pidato Presiden Soekarno tersebut. Dalam acara yang dipancarkan melalui stasion nasional di Jakarta, pidato-pidato tersebut di-*relay* oleh stasion-stasion regional di Bandung (untuk Jawa Barat), Yogyakarta (untuk Jawa Tengah), Surabaya (untuk Jawa Timur), Padang (untuk Sumatera Tengah dan Selatan), Medan (untuk Sumatera Utara dan Aceh), serta Makasar (untuk Sulawesi dan Kalimantan). Dan bagi masyarakat Indonesia yang mau mendengarkan pidato itu akan sanggup berdiri berjam-jam dengan penuh minat dan semangat mengikuti irama dan gayawacana yang disampaikan oleh Presiden Soekarno (Hidayat, 2003:125-142). Pidato dari Presiden Soekarno yang panjang-lebar tersebut kemudian dikutip dan dijadikan berita utama oleh surat-surat kabar secara nasional. Dengan demikian tidak hanya surat kabar, RRI pun pada tahun 1960-an telah menjadi alat penyiaran berita dari pemerintah yang bersifat nasional, di samping ada juga selingan berita yang bersifat budaya regional dan hiburan (Poesponegoro & Notosusanto eds., 1984:307).

Sementara itu Roeslan Abdulgani, yang namanya sebagai pejabat negara pada tahun 1960-an sering muncul dan bertindak sebagai JUBIR USMAN (Juru Bicara USDEK-MANIPOL), menyatakan sikap pemerintah terhadap pers. Dikatakannya bahwa pers harus menjadi alat revolusi yang belum selesai dan bagi pers yang tidak mendukung MANIPOL-USDEK lebih baik mundur atau akan ditenggelamkan oleh arus revolusi itu sendiri. Sikap yang lebih tegas dari pemerintah kepada pers dinyatakan langsung oleh Presiden Soekarno. Ketika melantik pimpinan kantor berita *Antara* di Jakarta pada bulan Oktober 1962, Presiden memberikan petunjuk, “*Antara* harus menjadi alat yang positif bagi revolusi. [...] Saya tidak menginginkan siaran berita yang objektif, tetapi jelas memihak kepada revolusi kita dan menghantam musuh-musuh revolusi”

TRI KORA (Tiga Komando Rakyat); RESOPIM (Revolusi, Sosialisme Indonesia dan Pimpinan Nasional); BERDIKARI (Berdiri di Atas Kaki Sendiri); TAVIP (Tahun *Vivere Pericoloso*, Tahun *Nyrempet-nyrempet* Bahaya); GANEFO (*Games of the New Emerging Forces*, Pekan Olahraga Kekuatan-kekuatan Negara Baru yang Sedang Bangkit); dan OLDEFO (*Old Establishment Forces*, Kekuatan-kekuatan Negara Lama yang Sudah Mapan).

(Soebagjjo I.N. & Soendoro, 1978:143-151; dan Smith, 1986:201-202). Karena musuh-musuh revolusi itu, menurut versi pemerintah, adalah kapitalisme dan imperialisme dengan antek-anteknya maka suara pers Indonesia – yang mendukung pemerintah – umumnya seragam: mengganyang kekuatan dan negara pendukung musuh revolusi itu. Dalam hal ini surat kabar *Harian Rakjat*, *Warta Bhakti* dan *Bintang Timur* milik PKI sangat aktif mendukung kebijakan politik pemerintah. Begitu juga dengan surat kabar *Suluh Indonesia* milik PNI dan *Duta Masyarakat* milik NU (Said, 1988:135-137).

Tidak adanya pers yang kritis dan bebas di Jakarta seperti *Indonesia Raya*, *Times of Indonesia*, *Nusantara*, *Harian Abadi* dan *Pedoman*, menjadikan pers pada tahun 1960-an umumnya mengalami involusi pandangan dan gagasan. Sejumlah surat kabar yang terbit, mewakili berbagai partai dan keyakinan politik, harus memberikan sebagian besar halamannya – yang hanya 4 atau 8 halaman itu – untuk memuat pernyataan-pernyataan ideologis pemerintah yang sarat dengan pengulangan belaka ketimbang tentang kebijakan dan program yang realistik. Tinggal sedikit tersisa halaman untuk berita-berita hasil liputan wartawannya sendiri (Feith, 1995:82). Kecenderungannya adalah bahwa pers kemudian berlomba dan saling mengklaim bahwa dirinya lebih revolusioner dan paling setia kepada Presiden Soekarno sebagai Pemimpin Besar Revolusi (PEMBESREV). Dalam konteks ini pers memang benar-benar telah terkooptasi dan mengalami proses “manipolisasi dan nasakomisasi” dengan implikasi tidak adanya kritik-kritik sosial yang terbuka dan langsung ditujukan kepada pemerintah.

Dalam suasana kontrol pemerintah yang ketat kepada pers, pada tahun 1962 masyarakat Indonesia menyaksikan lahirnya Televisi Republik Indonesia (TVRI). Lembaga baru yang sepenuhnya diprakarsai dan dikontrol oleh pemerintah ini pertama kali melakukan siaran pada bulan Agustus 1962 untuk memperingati Hari Kemerdekaan RI ke-17 dan siaran lebih dari sepekan peristiwa *Asian Games* di Jakarta. Seorang pengamat televisi menyatakan bahwa liputan yang pertama bersifat ekstrovert, populis, percaya diri dan menempatkan Indonesia sebagai bangsa modern serta aktif dalam masalah-masalah regional; sedangkan liputan kedua berkecenderungan introvert, menjaga jarak dengan dunia luar dan membentuk rasa jati diri yang didasarkan pada penegasan budaya nasional dalam ruang budaya yang khas (Kitley, 2001:23). Kehadiran televisi ini di Indonesia selama lebih dari 20 tahun (1960-an sampai 1980-an) dikontrol dan dikuasai penuh oleh pemerintah, dalam hal ini Departemen Penerangan, dengan acara-acara yang dikemas sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan politik penguasa.

Seiring dengan gaya kepemimpinan Presiden Soekarno yang megalomania pada tahun 1960-an, maka pers milik PKI mendapat tempat yang dominan dalam panggung politik Indonesia. Suara dari surat-surat kabar milik PKI ini, seperti *Harian Rakjat*, *Bintang Timur* dan *Warta Bhakti*, semakin keras dan lantang terutama ditujukan kepada lawan-lawan politiknya. Kolom tajuk rencana, catatan pojok dan karikatur *Harian Rakjat*, misalnya, sering berpolemik dan

saling kritik dengan surat kabar *Merdeka* dan *Berita Indonesia* milik B.M. Diah (Chaniago *et al.*, 1987:78-85). Begitu juga ketika para sastrawan, wartawan, seniman dan cendekiawan yang anti PKI membuat dan menandatangani "Manifes Kebudayaan", sebuah pernyataan tentang perlunya kebebasan berekspresi dan berkarya di Indonesia, pers PKI mengejeknya dengan plesetan "Manikebu" atau *Manikebo* [sperma kerbau], dengan konotasi yang tidak baik dan menjijikan. Pemerintah sendiri kemudian melarang "Manikebu" karena dianggap terlalu mengedepankan paham individualisme, egoisme dan liberalisme. Para sastrawan, wartawan, seniman dan cendekiawan yang turut menandatangani "Manikebu" kemudian dicurigai, diinterogasi dan dicap kontra revolusi (Moeljanto & Ismail, 1995:56-58).

Bukti lain bahwa tidak ada kebebasan pers pada tahun 1960-an adalah ketika ada keinginan dari Menteri Penerangan Maladi untuk meniadakan kolom "catatan pojok" dalam surat kabar. Kolom ini memang merupakan ciri khas pers Indonesia, letaknya di pojok dalam sebuah halaman surat kabar dan isinya yang singkat itu sarat dengan kritik-kritik sosial yang menggelitik, penuh humor dan sarkasme (Makah, 1977). Nama-nama penjaga kolom ini oleh pihak redaksi pers biasanya diambil dari nama atau sebutan yang populer. Surat kabar *Merdeka*, *Indonesia Raya*, *Pedoman*, *Duta Masyarakat* dan *Harian Rakjat* di Jakarta, misalnya, terkenal dengan nama-nama penjaga kolom catatan pojoknya seperti "Notes: Dr. Clenik"; "Di Pinggir Jalan: Mas Kluyur"; "Kili-kili"; "Bang Dul"; dan "Cabe Rawit: Wong Cilik". Surat-surat kabar di daerah juga memiliki nama penjaga kolom catatan pojok yang khas seperti "Ole-ole: Si Kabayan" *Pikiran Rakjat* (Bandung); "Berabe" *Kedaulatan Rakjat* (Yogyakarta); dan "Beta" *Surabaya Post* (Surabaya). Dalam pandangan pejabat pemerintah, dan juga tentara, isi catatan pojok itu semata-mata hanya mengkritik keadaan tanpa memberikan solusi, bukti-bukti kongkrit dan sedikit-banyak membebaskan penulisnya dari tanggung jawab langsung. Catatan pojok juga menjadi alat untuk mentertawakan kesialan orang lain, sehingga para pejabat yang terkena sasaran kritik merasa kehilangan muka dan tidak bisa tidur. Atau dalam pandangan Menteri Penerangan Maladi sendiri, keinginan untuk melarang catatan pojok itu karena kritik-kritiknya yang mengejek, mengadu domba, mencaci-maki dan menyalahkan orang lain tanpa mengindahkan nilai-nilai kesopanan (dalam Smith, 1986:198).

Usaha untuk membebaskan Presiden Soekarno dari pengaruh dominasi PKI juga mengalami batu sandungan. Sajuti Melik (dikenal juga dengan nama Muhammad Ibnu Sajuti alias Sodrono) menulis karangan "Beladjar Memahami Soekarno-isme", dan dimuat di surat-surat kabar yang anti komunis pada tahun 1963. Dengan dipelopori oleh B.M. Diah (dari surat kabar *Merdeka*), Adam Malik dan Sumantoro (dari Partai Murba dan kantor berita *Antara*), para wartawan sepakat untuk membentuk Badan Pendukung Soekarnoisme (BPS). Namun Presiden Soekarno nampaknya lebih berpihak kepada PKI, karena ia memandang kelompok komunis itu lebih fungsional untuk memperkuat kekuasaannya daripada kelompok yang lain. Dengan berdalih bahwa BPS itu

adalah upaya *to kill Soekarno with Soekarnoism* dan didukung oleh Amerika Serikat, PKI berhasil mempengaruhi Presiden Soekarno. Akibatnya, BPS dibubarkan oleh pada bulan Desember 1964 dan tidak kurang dari 20-an surat kabar yang mendukung BPS pada bulan Februari – Maret 1965 terkena pembredelan massal.⁹ Ancaman tentang pembredelan pers pada tahun 1960-an ternyata tidak hanya datang dari pihak tentara dan pemerintah, kini kaum komunis pun telah menjadi momok yang menakutkan bagi kebebasan pers di Indonesia.

Pada bulan Mei 1965, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru tentang pers. Sejalan dengan politik NASAKOM, pers harus menginduk kepada kekuatan-kekuatan sosial-politik yang diakui keberadaannya oleh pemerintah. Pers yang tidak memiliki “gandulan”, patronase, atau afiliasi dianggap sebagai institusi yang individualis, liberal, mengambang dan tidak revolusioner. Dengan kebijakan ini maka pers komunis mendapatkan keuntungan yang besar. Sebab dari 80 surat kabar yang terbit pada masa itu, PKI yang pers resminya bernama *Harian Rakjat* memiliki 14 surat kabar yang berafiliasi dengannya. Sedangkan NU dengan harian *Duta Masyarakat*-nya hanya memiliki 7 surat kabar yang berafiliasi dengannya. Wartawan kawakan, Djamaluddin Adinegoro, menyebut fenomena ini sebagai surat-surat kabar yang di-*slagorde*-kan (Sjahril & Sjureich, 1971:130). Dan dengan kebijakan ini pula ada beberapa surat kabar yang ingin tetap mempertahankan independesinya, seperti surat kabar *Pikiran Rakjat* di Bandung (1950-1965), harus menghentikan penerbitannya. Dalam hal ini surat kabar *Mertju Suar*, milik organisasi Muhammadiyah, menyatakan bahwa banyak pers yang lahir dulu karena tuntutan perjuangan, namun kini harus mati karena tuntutan peraturan (Iskantini, 2002:80).

Kebijakan pemerintah untuk mengontrol pers dapat dilakukan dengan berbagai tindakan. Alasan-alasan untuk menindak pers dalam banyak hal tergantung pada selera dan interpretasi pemerintah terhadap warna berita dan opini yang dinilai merugikan wibawa pemerintah, mengganggu ketenangan, keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keselamatan negara. Pihak pers sendiri sama sekali tidak diberi hak dan kesempatan untuk membela diri di pengadilan. Tindakan pemerintah terhadap pers tersebut dapat berupa: peringatan, pemanggilan, penahanan, interogasi, pemukulan, perusakan, pemenjaraan, denda atau ganti rugi dan pembredelan. Seorang pengamat yang tekun mencatat secara kuantitatif jumlah tindakan pemerintah terhadap pers selama tahun 1950/1960-an – baik pers Indonesia, pers Cina, pers Belanda, maupun pers asing lainnya – dalam tabel berikut ini:¹⁰

⁹Surat-surat kabar yang dibredel secara massal itu adalah: *Merdeka*, *Indonesian Observer*, *Warta Berita*, *Revolusioner*, *Semesta*, *Berita Sport dan Film*, *Garuda*, *Karyawan*, *Gelora Minggu*, *Suluh Minggu* dan *Mingguan Film* (Jakarta); *Indonesia Baru*, *Tjerdas Baru*, *Mimbar Umum*, *Waspada*, *Duta Minggu*, *Suluh Massa*, *Mimbar Teruna*, *Genta Revolusi*, *Resopim*, *Pembangunan*, *Waspada Teruna*, *Mingguan Film*, *Siaran Minggu* dan *Sjarahan Minggu* (Medan); *Aman Makmur* (Padang); dan *Pos Minggu* (Semarang). Selanjutnya lihat Hanazaki (1998:18 dan 33).

¹⁰Tabel tersebut nampaknya perlu diberi penjelasan sebagai berikut: Yang dimaksud dengan “pers asing lainnya” adalah termasuk pers Amerika Serikat; “seluruh pers”

Tahun	Pers Indonesia	Pers Cina	Pers Belanda	Pers Asing Lainnya	Seluruh Pers	Jumlah Tindakan
1952	5	4	3	1	1	14
1953	9	4	1	-	-	9
1954	5	2	1	-	-	8
1955	9	-	1	-	3	13
1956	22	-	-	6	4	32
1957	91	10	8	9	7	125
1958	58	20	6	8	3	95
1959	59	5	1	2	6	73
1960	74	8	-	2	9	93
1961	47	1	-	1	3	52
1962	9	2	-	3	2	16
1963	3	-	-	-	3	6
1964	4	-	-	6	-	10
1965	8	-	-	-	2	10

Semakin dominannya pers PKI menjadikan kekuatan-kekuatan lain berusaha untuk mengimbangnya. Dalam hal ini TNI-AD berusaha mendorong dan melindungi penerbitan pers yang bersifat anti komunis. Terbitnya surat kabar *Berita Yudha* dan *Angkatan Bersendjata* pada tahun 1965 adalah dalam rangka untuk mengimbangi pers PKI tersebut. Surat kabar *Angkatan Bersendjata*, misalnya, menerbitkan cabangnya di berbagai daerah, seperti *Angkatan Bersendjata Edisi Djawa Barat* dan *Angkatan Bersendjata Edisi Djawa Timur*. Juga golongan Kristen Katholik pada bulan Juni 1965 – dengan dipelopori oleh Frans Seda, PK Ojong dan Jakob Oetama – mendirikan surat kabar *Kompas*, yang pada masa-masa awal berdirinya sering diplesetkan menjadi: *Kom-ando Pas-tor*. Hal ini disebabkan selain karena tokoh pendirinya dari kalangan Katholik, juga karena *Kompas* banyak dilanggan dan dibaca oleh para pastor. Surat kabar ini dalam perkembangannya kemudian akan menjadi pers yang besar dan berpengaruh di Indonesia sampai sekarang (Adam, 2002:137-149).

Tahun 1965 dan 1966 adalah periode kritis bagi bangsa Indonesia. Konfrontasi terhadap negara baru Malaysia, yang dimulai sejak tahun 1963, belum juga berakhir. Kehidupan ekonomi semakin suram. Terutama masalah inflasi, merupakan salah satu kesulitan besar yang tidak pernah dapat

maksudnya adalah jika tindakan pemerintah itu berlaku bagi semua pers; serta pers Belanda dan pers Cina sejak tahun 1960 dan 1963 tidak diperbolehkan lagi terbit di Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan "tindakan pemerintah" adalah serangkaian tindakan yang didasarkan pada penilaian sepihak pemerintah, karena pers dianggap telah melakukan: (1) tuduhan atau alasan tidak jelas; (2) pelanggaran KUHP [Kitab Undang-undang Hukum Pidana]; (3) pengecaman terhadap pemerintah atau pejabat pemerintah; (4) pengaruh atau pemilihan asing; (5) pemuatan berita yang tidak benar; (6) penghinaan terhadap pemerintah atau pejabat pemerintah; (7) berita tidak bersumber resmi; (8) pelanggaran ketentuan perizinan; (9) macam-macam; (10) membocorkan rahasia jabatan; (11) pemuatan berita tanpa izin; (12) penolakan menyebut sumber berita; dan (13) cenderung mengganggu keamanan dan ketertiban. Selanjutnya lihat Smith (1986:103-221).

diselesaikan oleh Presiden Soekarno. Tingkat inflasi itu semakin menanjak sejak awal tahun 1960 dan mencapai puncaknya pada tahun 1966 yang mencapai lebih dari 600 persen (Nasution, 1983:1). Seorang pengamat memberikan ilustrasi yang komparatif, jika pada tahun 1958 indeks biaya hidup itu hanya 100, pada tahun 1961 meningkat menjadi 180, tahun 1962 menjadi 470, dan pada akhir tahun 1965 indeks biaya hidup itu menjadi 36.347 (Pauker, 1967:10). Suasana politik dan ekonomi yang suram pada masa pemerintahan Presiden Soekarno di akhir tahun 1950-an dan awal tahun 1960-an itu direkam secara hidup oleh Mochtar Lubis dalam karya sastranya yang terkenal, *Senja di Jakarta*.¹¹ Kebuntuan politik dan ekonomi itu seakan terpecahkan oleh sebuah peristiwa yang akan mengubah keadaan selanjutnya, ketika sekelompok perwira menengah dari TNI-AD menculik dan membunuh para perwira tingginya pada tanggal 30 September dan 1 Oktober 1965. Peristiwa yang dikenal dengan G-30-S (Gerakan 30 September) 1965 ini sampai sekarang masih merupakan misteri dan mengundang banyak perdebatan untuk memahaminya secara objektif dan benar.¹²

Namun yang menarik dari peristiwa G-30-S tahun 1965 ini adalah bahwa para pelakunya memandang penting media komunikasi massa. Di pagi buta pada tanggal 1 Oktober 1965, mereka sudah menguasai RRI dan gedung telekomunikasi di Jakarta. Dengan dalih menyelamatkan revolusi dan melindungi Presiden Soekarno, mereka mengumumkan melalui RRI tentang tujuan gerakan, program aksi dan penyingkiran para Jenderal Angkatan Darat. Sementara itu masyarakat masih dalam kebingungan dan penuh tanda tanya tentang peristiwa penting di Jakarta, mengingat RRI merupakan satu-satunya sumber berita yang ada. Surat-surat kabar di Jakarta dilarang terbit pada tanggal 1 Oktober 1965 oleh PEPERDA Jakarta Raya. Masyarakat kemudian menyaksikan keganjilan yang terjadi pada pers milik PKI di Jakarta. Surat kabar *Warta Bhakti*, yang terbit dengan edisi sore, pada tanggal 1 Oktober 1965 menurunkan berita utama dan analisis berita yang bersifat mendukung G-30-S di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung (Said, 1988:154). Pada petang dan malam hari, masih tanggal 1 Oktober 1965 juga, gerakan itu ternyata begitu mudah dipatahkan oleh Panglima KOSTRAD (Komando Strategis Angkatan Darat), Mayor Jenderal Soeharto. RRI dan gedung telekomunikasi juga telah direbut kembali oleh pasukan-pasukan tentara yang setia kepada KOSTRAD. Atas nama revolusi dan Presiden Soekarno, Mayor Jenderal Soeharto mengumumkan melalui RRI bahwa mereka yang menamakan dirinya G-30-S adalah kontra revolusi. Namun keesokan harinya, tanggal 2 Oktober dan 3 Oktober 1965, surat kabar *Harian Rakjat* seperti sengaja dibiarkan untuk terbit

¹¹Novel ini pada mulanya diterjemahkan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris, dan diterbitkan dengan judul *Twilight in Djakarta* (New York: The Vanguard Press, Inc., 1964); dan baru pada tahun 1970-an diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya lihat Mochtar Lubis (1981).

¹²Untuk melihat rangkuman berbagai versi dan interpretasi terhadap peristiwa ini lihat, misalnya, Taufik Abdullah (1999); Asvi Warman Adam (1999); dan Andi Suwirta (2000:43-49).

dan berturut-turut masih menurunkan berita utama, tajuk rencana, catatan pojok dan gambar karikatur yang mendukung G-30-S.¹³ Hal ini sudah cukup bagi TNI-AD untuk menunjukkan dalih tak terbantahkan bahwa PKI berada di balik dan sebagai dalang dari peristiwa yang kemudian dikenal dengan G-30-S/PKI tahun 1965 itu.

Dengan pecahnya peristiwa G-30-S 1965 tersebut maka kontrol terhadap pers sepenuhnya berada di tangan TNI-AD. Surat-surat kabar milik PKI (*Harian Rakjat*, *Bintang Timur* dan *Warta Bhakti*) kemudian dibredel untuk selamanya. Para wartawan yang bekerja di surat kabar, kantor berita *Antara* dan RRI yang dinilai "kiri" dan mendukung G-30-S 1965 dipecat, ditahan dan dipenjarakan oleh TNI-AD. Kini TNI-AD, di bawah kepemimpinan Mayor Jenderal Soeharto, memanfaatkan pers untuk kepentingan dan tujuan politiknya yang pasti. Ketika media TVRI menayangkan secara langsung penggalan jenazah para Jenderal di daerah Lubang Buaya dan wawancara singkat dengan Mayor Jenderal Soeharto tentang apa dan bagaimana G-30-S itu, histeria psikologi massa diarahkan untuk mengutuk kekejaman PKI dan mempertanyakan sikap yang mendukung atau ragu-ragu dari kelompok lain terhadap G-30-S, termasuk sikap dari Presiden Soekarno sendiri. Surat-surat kabar milik TNI-AD, seperti *Berita Yudha* dan *Angkatan Bersendjata*, juga terus-menerus mengekspose berita-berita dan opini yang menyudutkan PKI dan Presiden Soekarno. Dalam hal ini sungguh besar peranan media massa dalam membangkitkan semangat balas dendam terhadap PKI, atau orang yang dituduh komunis, sehingga menyebabkan terjadinya pembunuhan besar-besaran di daerah Jawa (Tengah dan Timur) serta Bali (Cribb ed., 1990).

Pers bagi Presiden Soekarno akhirnya seperti pedang bermata dua. Di satu sisi ketika berada di puncak kekuasaannya ia bisa mengontrol dan mengendalikan pers secara efektif; namun di sisi lain ketika kontrol terhadap pers itu jatuh ke pihak di luar dirinya (dalam hal ini ke TNI-AD), ia menjadi bulan-bulanan pers tanpa diberi hak dan kesempatan untuk membela diri. Ketakutan Presiden Soekarno terhadap pers yang akan "menelanjangi pribadinya dan menjadi tontonan bagi masyarakat dunia" (Adams, 1966:413) terbukti, ketika pada tahun-tahun sesudah G-30-S 1965 ia menjadi sasaran kritik, cemoohan dan sarkasme yang vulgar terhadap kepemimpinan dan gaya hidupnya yang dinilai otoriter dan secara moral sulit dipertanggungjawabkan. Soekarno dipermalukan dan diruntuhkan wibawanya ketika para pembantu terdekatnya, menteri-menteri yang dinilai oleh TNI-AD mendukung G-30-S/PKI, ditangkap dan diseret ke pengadilan seolah-olah untuk membuat pengakuan tentang kebobrokan moral, skandal pribadi, korupsi dan tindakan politik kotor lainnya. Sidang-sidang pengadilan yang diliput secara luas oleh pers itu (RRI dan surat-surat kabar milik TNI-AD) pada akhirnya benar-benar

¹³Suratkabar *Harian Rakjat* pada tanggal 2 Oktober 1965 menurunkan berita utama "Letkol Untung, Komandan Batalion 'Tjakrabirawa' Menjelamatkan Presiden dan RI dari KUP Dewan Djendral"; catatan pojok "Gerakan 30 September"; dan karikatur "Film Minggu ini: Djatuhnja Djendral2". Selanjutnya lihat Muljanto & Ismail (1995:61-62).

turut mereduksi otoritas Presiden Soekarno. Memang di akhir tahun 1965 itu era Soekarno nampaknya akan segera berakhir, yang dalam banyak hal aura kekuasaannya turut dipadamkan oleh pers. Era baru akan segera dimulai, dengan dominasi politik dari TNI-AD di bawah kepemimpinan Mayor Jenderal Soeharto, yang dalam banyak hal juga karena keberhasilannya dalam menggalang dukungan dari kalangan pers.

KESIMPULAN

Selama 15 tahun setelah Indonesia memperoleh kedaulatannya sebagai negara merdeka, pers telah memberikan kesaksian yang aktual terhadap peristiwa-peristiwa yang dinilai penting pada zamannya sepanjang tahun 1950-1965. Pada masa-masa awal pengakuan kedaulatan (1950-1956), pers Indonesia merasakan kebebasannya yang besar. Terhadap pemerintah, tentara dan Presiden Soekarno, pers memberikan dukungan yang positif selama mereka mengambil kebijakan politik, sosial dan ekonomi yang menguntungkan publik, mendorong suasana kehidupan yang demokratis, mengharumkan nama bangsa dan menjaga persatuan nasional. Peristiwa-peristiwa seperti KAA I tahun 1955 di Bandung, PEMILU I tahun 1955, penumpasan gerakan DI/TII (1949-1962) dan pembebasan wilayah Irian Barat agar bersatu dengan wilayah Indonesia pada awal tahun 1960-an, didukung sepenuhnya oleh pers. Pers Belanda yang ragu-ragu dan tidak mendukung kebijakan politik pemerintah, harus mengakhiri penerbitannya pada akhir tahun 1950-an.

Namun dukungan pers kepada pemerintah itu bukannya tanpa kritik dan kehilangan kebebasannya sama sekali. Terhadap peristiwa yang dinilai menyalahi kehidupan demokrasi, pers mengkritiknya secara tajam dan terang-terangan. Beberapa peristiwa seperti tindakan otoriter tentara yang ingin membubarkan Parlemen pada tahun 1952, skandal tentang kehidupan poligami Presiden Soekarno pada tahun 1954, prostitusi terselubung dalam acara KAA I di Bandung, korupsi dan kolusi antara pejabat negara dan tentara dengan para pengusaha Cina dan kebijakan pemerintah lainnya yang tidak transparan, dijadikan bahan berita dan opini oleh pers Indonesia. Berita dan opini pers itu, khususnya surat kabar, disajikan sedemikian rupa melalui kolom berita utama, analisis berita, tajuk rencana, catatan pojok dan gambar karikатурnya. Pers Indonesia pada tahun 1950-1956, dengan demikian, menikmati kebebasannya yang besar dalam alam kehidupan politik Demokrasi Liberal.

Tanda-tanda kebebasan pers akan surut dimuai setelah tahun 1956. Silih bergantinya kabinet pemerintahan parlementer, tiadanya pemenang kekuatan politik yang dominan dalam PEMILU 1955 dan pergolakan di daerah menentang pemerintah pusat pada tahun 1957, mendorong pemerintah, tentara dan Presiden Soekarno untuk memberlakukan negara dalam keadaan bahaya (SOB, *Staat van Oorlog en Beleg*). Atas nama SOB, pers dibatasi kebebasannya. Bahkan pada tahun 1958, pers dikontrol oleh pemerintah dan tentara dengan cara harus meminta SIC (Surat Izin Cetak). Ketika Presiden Soekarno meraih kekuasaannya secara efektif (1959-1965), kebebasan pers benar-benar sudah

berakhir di Indonesia karena ia hanya dijadikan alat dan corong resmi bagi kebijakan politik pemerintah. Namun pers yang terkooptasi oleh kekuasaan itu bisa juga turut meruntuhkan kekuasaan. Kejatuhan Presiden Soekarno, yang diawali dengan peristiwa G-30-S tahun 1965, dalam banyak hal juga karena pers yang semula mampu dikendalikannya secara ketat itu kemudian berbalik menyerang dan meruntuhkan kekuasaan Presiden. Sejak bulan Oktober 1965, pers telah jatuh di bawah kendali tentara, terutama TNI-AD, dan turut mereduksi peran politik dominan PKI dan meruntuhkan wibawa Presiden Soekarno di satu sisi, serta di sisi lain mengusung kekuasaan baru di bawah kepemimpinan Mayor Jenderal Soeharto, yang kemudian akan terpilih sebagai Presiden RI setelah era Soekarno.

Bibliografi

- Abdullah, Taufik. (1999). "Perdebatan Sejarah dan Tragedi 1965". *Makalah* dalam Seminar Pra KIPNAS dengan tema Memandang Tragedi Nasional 1965 Secara Jernih di Kampus PUSPITEK Serpong, Jawa Barat, pada tanggal 8 September.
- Adam, Asvi Warman. (1999). "Kontrol Sejarah Semasa Pemerintahan Soeharto". *Makalah* dalam Seminar Pra KIPNAS dengan tema Memandang Tragedi Nasional 1965 Secara Jernih di Kampus PUSPITEK Serpong, Jawa Barat, pada tanggal 8 September.
- Adam, Asvi Warman. (2002). "Kompas dalam Fragmen Sejarah Orde Baru" dalam *Historia: Jurnal Pendidikan Sejarah*, No.6, Vol.III (Desember). Bandung: Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS UPI.
- Adams, Cindy. (1966). *Bung Karno: Penjambung Lidah Rakjat Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung, Terdjemahan.
- Ali, Fachry. (1993). "Pengantar: Dinamika Sosial-Politik Indonesia Tahun Lima Puluhan" dalam Boyd R. Compton. *Kemelut Demokrasi Liberal: Surat-surat Rahasia*. Terjemahan. Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia.
- Anwar, Rosihan. (1981). *Sebelum Prahara: Pergolakan Politik Indonesia, 1961-1965*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan.
- Anwar, Rosihan. (1983). *Menulis dalam Air, Di Sini Sekarang Esok Hilang: Sebuah Otobiografi*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan.
- Atmakusumah. (1992). "Mochtar Lubis dan Indonesia Raya" dalam Atmakusumah [ed.]. *Mochtar Lubis: Wartawan Jihad*. Jakarta: Penerbit Harian Kompas.
- Chaniago, J.R. et al. (1987). *Ditugaskan Sejarah: Perjuangan Merdeka, 1945-1985*. Jakarta: PT Merdeka Sarana Usaha.
- Cribb, Robert [ed.]. (1990). *The Indonesian Killings of 1965-1966: Studies from Java and Bali*. Clayton, Victoria, Australia: Centre of Southeast Asian Studies Monash University.
- Feith, Herbert. (1962). *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. Ithaca, New York: Cornell University Press.
- Feith, Herbert. (1995). *Soekarno-Militer dalam Demokrasi Terpimpin*. Terjemahan. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Flournoy, Don Michael [ed.]. (1989). *Analisa Isi Surat kabar-surat kabar Indonesia*. Terjemahan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Gani, M. (1978). *Surat Kabar Indonesia pada Tiga Zaman*. Jakarta: Departemen Penerangan RI.
- Gardner, Paul F. (1999). *Lima Puluh Tahun Hubungan Amerika Serikat – Indonesia: Bersama dalam Harapan, Sendirian dalam Kecemasan*. Terjemahan. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Hanazaki, Yasuo. (1998). *Pers Terjebak*. Terjemahan. Jakarta: Penerbit ISAI.
- Harsono, Andreas. (1997). "Suara Merdeka: Takut atau Takluk?" dalam Y. Krisnawan [ed.]. *Pers Memihak Golkar?*. Jakarta: Penerbit ISAI.
- Haryanto, Ignatius. (1996). *Pembredelan Pers di Indonesia: Kasus Koran Indonesia Raya*. Jakarta: LSPP [Lembaga Studi Pers dan Pembangunan].
- Hatta, Mohammad. (1988). *Mendayung Antara Dua Karang*. Jakarta: PT Bulan-Bintang, cet.kedua.
- Hendrowinoto, Nurinwa Ki S. (1985). *A. Azis Wartawan Kita*. Jakarta: PT Gramedia.
- Hidayat, Bambang. (2003). "Karakter Tak Terlupakan: Soekarno Pemimpi, Penggagas, dan Pelaksana" dalam *Historia: Jurnal Pendidikan Sejarah*, No.7, Vol.IV. Bandung: Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS UPI.
- Hohenberg, John. (1968). *The News Media: A Journalist Looks at His Profession*. New York ect.: Holt, Rinehart and Winston, Inc.
- Iskantini, Euis. (2002). "Harian Umum *Pikiran Rakjat* di Bandung, 1950-1065: Pers Lokal yang Berorientasi Nasional" dalam *Historia: Jurnal Pendidikan Sejarah*, No.6, Vol.III. Bandung: Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS UPI.
- Junaedhie, Kurniawan. (1991). *Ensiklopedi Pers Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kakiailat, Toeti. (1997). *B.M. Diah: Wartawan Serba Bisa*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kitley, Philip. (2001). *Konstruksi Budaya Bangsa di Layar Kaca*. Terjemahan. Jakarta: LSPP, ISAI dan PT Media Lintas Inti Nusantara.
- Lubis, Mochtar. (1964). *Twilight in Djakarta*. New York: The Vanguard Press, Inc..
- Lubis, Mochtar. (1981). *Senja di Jakarta*. Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, cet.kedua.
- Lubis, Mochtar. (1987). *Catatan Subversif*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan PT Penerbit Gramedia, cet.kedua.
- Mahidin M. (1992). "Pembredelan Pedoman: Sirnanya Suatu Harapan" dalam Tribuana Said [ed.]. *H. Rosihan Anwar: Wartawan dengan Aneka Citra*. Jakarta: Penerbit Harian Kompas.
- Makah, Masmimar. (1977). "Pojoek Sebagai Penyalur Kritik" dalam *Prisma*, No.10 (Oktober). Jakarta: LP3ES.
- Moeljanto, D.S. & Taufik Ismail. (1995). *Prahara Budaya: Kilas-Balik Ofensif LEKRA/PKI dkk (Kumpulan Dokumen Pergolakan Sejarah)*. Jakarta: Penerbit Mizan.
- Nasution, Adnan Buyung. (1995). *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959*. Terjemahan. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.
- Nasution, Anwar. (1983). *Financial Institutions and Policies in Indonesia*. Singapore: ISEAS [Institute of South East Asian Studies].
- Noer, Deliar. (1987). *Partai Islam di Pentas Nasional, 1945-1965*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.
- Noer, Deliar. (1990). *Mohammad Hatta: Biografi Politik*. Jakarta: Penerbit LP3ES.
- Oetama, Jakob. (1987). *Perspektif Pers Indonesia*. Jakarta: Penerbit LP3ES.
- Oetama, Jakob. (1992). "Mencoba Mewarisi Api Perjuangan Pers Mochtar Lubis" dalam Atmakusumah [ed.]. *Mochtar Lubis: Wartawan Jihad*. Jakarta: Penerbit Harian Kompas.
- Pauker, Guy J. (1967). *Indonesia in 1966: The Year of Transition*. Santa Monica, California: The Rand Corporation.
- Poesponegoro, Marwati Djoened & Nugroho Notokusanto [eds.]. (1984). *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI dan PN Balai Pustaka, cet.kelima.
- Said, Tribuana. (1988). *Sejarah Pers Nasional dan Pembangunan Pers Pancasila*. Jakarta: CV Haji Masagung.
- Said, Tribuana [ed.]. (1992). *H. Rosihan Anwar: Wartawan dengan Aneka Citra*. Jakarta: Penerbit Harian Kompas.

- Siahaan, Hotman M. & Tjahjo Purnomo W. [eds.]. (1993). *Tajuk-tajuk dalam Terik Matahari: Empat Puluh Tahun Surabaya Post*. Surabaya: Yayasan Keluarga Bhakti.
- Sjahril, T. & M. Sjureich. (1971). *Garis Besar Perkembangan Pers Indonesia*. Djakarta: SPS [Serikat Penerbit Surat kabar] Pusat, 1971).
- Smith, Edward C. (1986). *Pembreidelan Pers di Indonesia*. Terjemahan. Jakarta: PT Pustaka Grafitipers.
- Soebagijo I.N. (1977). *Sejarah Pers Indonesia*. Jakarta: Dewan Pers.
- Soebagijo I.N. (1981). *Jagat Wartawan Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.
- Soebagijo I.N. & Soendoro. (1978). *Lima Windu "Antara": Sejarah & Perjuangannya*. Jakarta: LBKN Antara.
- Sophiaan, Manai. (1979). "Wilopo dan Peristiwa 17 Oktober" dalam Soebagijo I.N. et al.. *Wilopo 70 Tahun*. Jakarta: PT Gunung Agung.
- Surjomihardjo, Abdurrachman et al. (2002). *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Suwirta, Andi. (2000). "Mengkritisi Peristiwa G-30-S Tahun 1965: Dominasi Wacana Sejarah Orde Baru dalam Sorotan" dalam *Historia: Jurnal Pendidikan Sejarah*, No.1, Vol.1. Bandung: Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS UPI.
- Suwirta, Andi. (2001). *Revolusi Indonesia dalam News and Views: Sebuah Antologi Sejarah*. Bandung: Penerbit Suci Press.
- Suwirta, Andi. (2004). "Atang Ruswita, Pikiran Rakyat, dan Kritik Sosial" dalam Asmawi Zainul & Didin Saripudin [eds.]. *50 Tahun Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS UPI, 1954-2004: Mozaik Pemikiran tentang Sejarah, Pendidikan Sejarah, dan Budaya*. Bandung: Historia Utama Press.

Surat Kabar:

- Harian Abadi* (Jakarta: 31 Oktober 1961).
- Merdeka* (Jakarta: 18 Oktober 1952, 20 Oktober 1952, dan 17 Oktober 1953).
- Pedoman* (Jakarta: 24 Februari 1952).



Gambar 1
 Surat kabar *Pedoman* (Jakarta), pimpinan Rosihan Anwar, edisi 9 September 1955 yang
 memberitakan tentang Pemilihan Umum 1955.
 (Sumber: Said ed., 1992:108)



Gambar 2

Surat kabar *Duta Masyarakat* (Jakarta), milik organisasi NU (Nahdatul Ulama), yang terbit sejak awal tahun 1954 menjadi saksi sejarah bagi bangsa Indonesia pada tahun 1950/1960-an. (Sumber: Said, 1988:95)



Gambar 3

Surat kabar *Suluh Indonesia* (Jakarta), milik PNI (Partai Nasional Indonesia), edisi 17 Februari 1958 yang selalu menyanjung dan mendukung Presiden Soekarno sebagai tokoh pendiri PNI. (Sumber: Said, 1988:115)



Gambar 4
Surat kabar *Indonesia Raya* (Jakarta), pimpinan Mochtar Lubis, edisi 1 September 1958 yang menunjukkan bahwa “pers jihad” ini akan segera mengakhiri hidupnya pada akhir tahun 1950-an karena konflik internal dan tekanan penguasa.
(Sumber: Atmakusumah ed., 1992:74)



Gambar 5

Surat kabar *Harian Rakjat* (Jakarta), milik PKI (Partai Komunis Indonesia), edisi 15 Februari 1963 yang bersuara lantang mengganyang musuh-musuh politiknya, namun nasibnya juga harus tragis yakni kemudian mati bersamaan dengan matinya PKI di Indonesia sejak 1965. (Sumber: Said, 1988:133)



Gambar 6

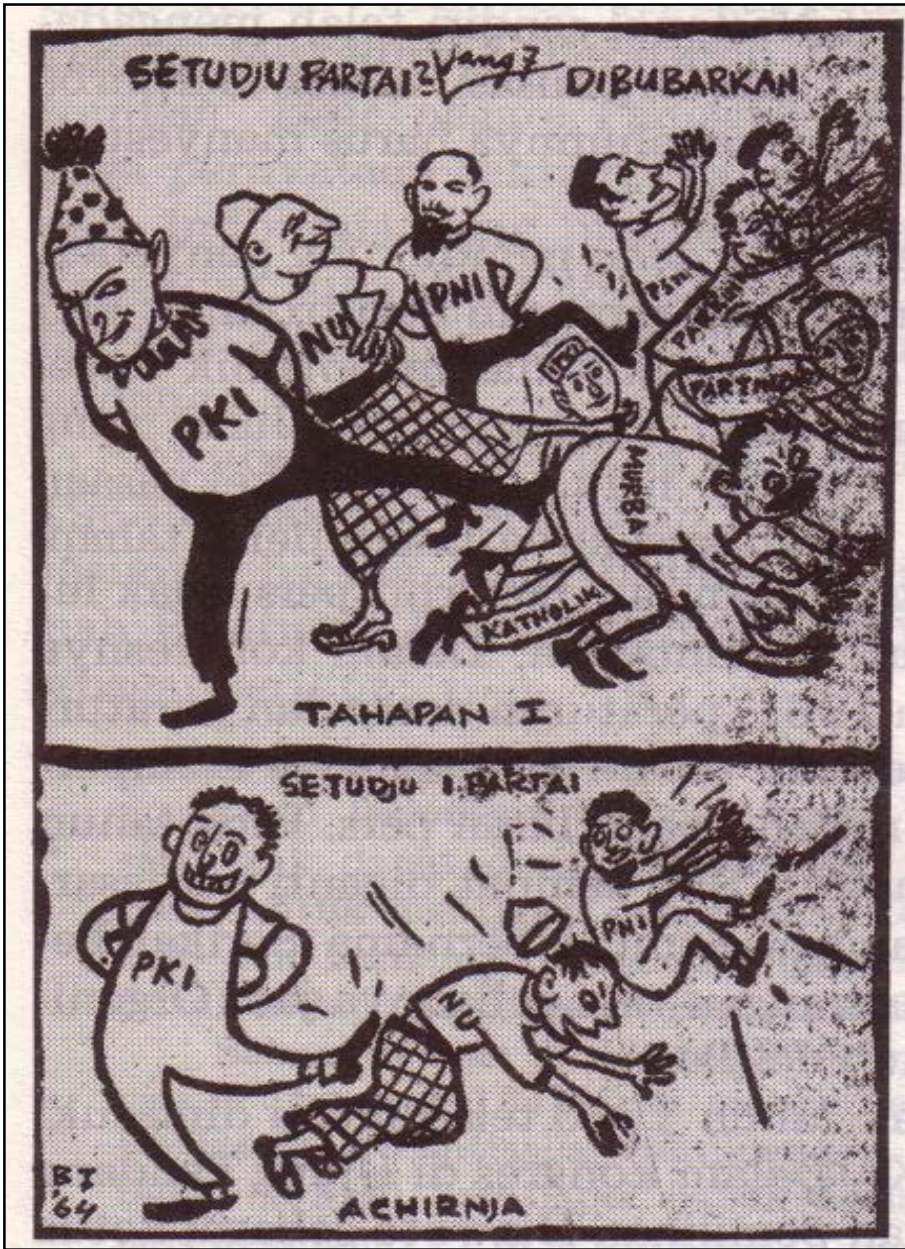
Surat kabar Angkatan Bersendjata (Jakarta), milik TNI-AD (Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat), edisi 2 Oktober 1965 merupakan bukti bahwa tentara di Indonesia tidak hanya memiliki "senjata" tetapi juga mampu memainkan "pena" untuk membela kepentingan politik dwi-fungsinya.

(Sumber: Said, 1988:152)



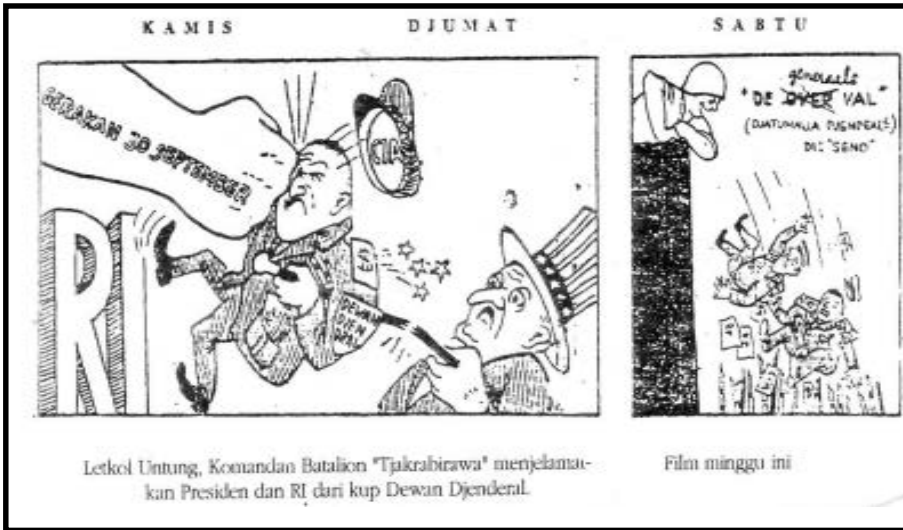
Gambar 7

Karikatur surat kabar *Indonesia Raya*, pimpinan Mochtar Lubis, edisi 30 Juli 1957 yang bersuara paling berani dalam mengkritik perilaku politik Presiden Soekarno yang dinilai tidak demokratis. (Sumber: Atmakusumah ed., 1992:71)



Gambar 8

Karikatur surat kabar *Berita Indonesia* (Jakarta), milik B.M. Diah, edisi 20 Juni 1964 yang turut berpolemik dengan surat kabar *Harian Rakjat* milik PKI karena *toch* pada akhirnya PKI hanya akan merebut kekuasaan mutlak sambil menyingkirkan lawan-lawan politiknya. (Sumber: Said, 1988:138)



Gambar 9

Karikatur surat kabar *Harian Rakjat*, milik PKI, edisi 2 Oktober 1965 yang mendukung G-30-S (Gerakan 30 September), sebuah dalih yang tak terbantahkan bagi TNI-AD bahwa PKI terlibat dan menjadi dalang utamanya, sehingga peristiwa itu layak disebut dengan G-30-S/PKI. (Sumber: Muljanto & Ismail, 1995:61)



Gambar 10

Empat Pendekar Pers Indonesia: Dari kanan ke kiri, B.M. Diah (*Merdeka*), Mochtar Lubis (*Indonesia Raya*), Rosihan Anwar (*Pedoman*), dan Suardi Tasrif (*Harian Abadi*). Pandangan boleh berbeda, tetapi persahabatan adalah paling utama. Dari keempat tokoh tersebut kini tinggal Rosihan Anwar yang masih hidup; dan dari empat surat kabar itu kini tinggal *Merdeka* yang masih bertahan. (Sumber: Chaniago et al., 1987:24)